# BAB VI PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Dari hasil yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan kondisi eksisting, kinerja pelayanan angkutan perkotaan di Kota Palembang belum beroperasi dengan baik terutama indikator faktor muat yang kurang dari 70%. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat penggunaan angkutan umum di Kota Palembang, Headway dan waktu tunggu yang lama menyebabkan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Maka diperlukan analisis kinerja usulan untuk meningkatkan kinerja pelayanan angkutan perkotaan.
2. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Palembang maka dilakukan rasionalisasi jumlah armada maka diperoleh jumlah armada ideal sehingga meningkatkan faktor muat angkutan.
3. Setelah dilakukan rasionalisasi jumlah armada angkutan perkotaan maka kinerja pelayanan angkutan perkotaan di Kota Palembang menjadi lebih baik dari kinerja kepengusahaan di 7 trayek yang mendapatkan keuntungan sangat rendah setelah dilakukan analisis keuntungan meningkat.
4. Dapat diberikan usulan tarif dengan merata-ratakan perhitungan tarif berdasarkan kondisi eksisting, BOK, ATP, WTP, maka tarif ini bisa dijadikan acuan dan usulan kepada pemerintah Kota Palembang untuk membuat Surat Keputusan atau Ketetapan Tarif yang tidak merugikan berbagai pihak regulator, operator, maupun penggunaan jasa. Harga yang diberlakukan untuk Trayek Karya Jaya Ampera sebesar Rp 5.306, Trayek Plaju Ampera Rp 4.517, Trayek Perumnas Ampera Rp 5.190, Trayek Lemabang Sei Lais Rp 4.367, Trayek KM 5 Ampera Rp 4.344, Trayek Way Hitam Talang Betutut Rp 5.595, dan Trayek Sekip Ampera Rp 4.833

## Saran

1. Perlu dilakukan analisis jumlah armada dan diketahui jumlah kendaraan yang beroperasi maka kinerja pelayanan angkutan perkotaan di Kota Palembang mulai dari frekuensi, headway, waktu tunggu, pendapatan dan untung rugi operator mengalami perubahan dan perlu adanya pengkajian mengenai sistem operasi dari pemerintah mengenai dampak dari peningkatan kinerja dari jumlah armada yang beroperasi sebelumnya dengan kebutuhan jumlah armada yang optimal.
2. Menerapkan hasil perhitungan jumlah armada untuk meningkatan pelayanan angkutan perkotaan di Kota Palembang.
3. Penetapan tarif angkutan perkotaan di Kota Palembang diharapkan segera dilakukan dalam forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai Peraturan Pemerintah agar dapat menetapkan tarif yang sesuai dan seimbang dari ketiga sisi yaitu operator, user dan regulator, sehingga pendapatan operator tidak mengalami kerugian.
4. Perlunya kerjasama dan komitmen dari sisi kepengusahaan ( Operator) untuk mengadakan peningkatan pelayanan berdasarkan kinerja pelayananya.

# DAFTAR PUSTAKA

2009.Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Jakarta.

2014.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260. Jakarta.

2022. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 251 Tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan yang Diperhitungkan Dalam Pemberian Subsidi atau Kompensasi dan Perhitungan Besaran Tarif Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional.

2019.Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Jakarta : Departemen Perhubungan.

2013.PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jakarta.

2002. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur, Jakarta : Departemen Perhubungan

2022. Peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum

2002. Keputusan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Rute Trayek Angkutan Penumpang Umum Dan Bus Kota.

Aditomo Mahardika Putra, R. (2021). Perancangan Sistem Aplikasi Trayek Angkutan Umum di Kota Bandar Lampung Berbasis Android. *International Journal of Research Publications*, *83*(1), 1–12.

Amir, M., & Rahman, A. (2020). Analisis Dampak Transportasi Online Terhadap Transportasi Konvensional (Bentor) Di Kota Makassar. *Jurnal Mirai Managemnt*, *5*(1), 313–329.

Nugraha, D. A. (2020). Arahan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201*, *2*(1), 41–49.

Panjaitan, S., & Sihombing, A. T. (2022). *TANJUNG BALAI DENGAN METODE SURFACE DISTRESS INDEKS ( SDI ) perubahan yang besar yaitu salah satunya dengan usaha pembangunan dan perbaikan jalan . Hal Dalam proses perbaikan jalan diperlukan Survey Kondisi Jalan , Road Condition System ( RCS ) sangat mem*. *2*(1), 25–38.

Pramudyasari, V., & Puji Astutik, H. (2023). Analisis Kemampuan dan Kemauan (Penulis pertama dkk.) | 268 Madani. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *1*(7), 2986–6340.

Rahayu, T., Qarinur, M., Arfis, A., Razali, M., Sipil, T., Teknik, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). *Kinerja Pelayanan Kereta Api Komuter Krd Sri Lelawangsa Pada Medan – Binjai*. 341–347.

Rozaq. (2018). *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi*. *5662*(November), 35–45.

Sibuea, D. T. A. (2019). Studi Karakteristik Pengguna Angkutan Umum Dalam Pemilihan Moda Transportasi. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan Dan Sipil*, *5*(2), 64–72.

Tamin, O. Z., Rahman, H., Kusumawati, A., Munandar, A. S., & Setiadji, B. H. (1999). Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) di DKI Jakarta. *Jurnal Transportasi*, *1*(2), 121–139.

Tim PKL Kota Palembang. 2023. Laporan Umum Kinerja Transportasi Darat Kota

Palembang Tahun 2023. Bekasi: PTDI-STTD.

Wakari, V. V, A Rogi, O. H., & Makarau, V. H. (2019). Daya Dukung Layanan Angkot Berdasarkan Jarak JangkauanMasyarakat Terhadap Jalur Trayek Di Kota Manado. *Jurnal Spasial*, *6*(3), 554–560.